MODERNISASI
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Implikasi dan Posisi PTAIN di Tengah Masyarakat Global
Fauzan
MODERNISASI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Implikasi dan Posisi PTAIN di Tengah Masyarakat Global

Fauzan
MODERNISASI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Implikasi dan Posisi PTAIN di Tengah Masyarakat Global

Penulis:
Fauzan

Desain Sampul dan Isi:
Tim Faza Media

ISBN : 978-979-15389-4-7

Penerbit:
Faza Media
Komp. Perum Puri Pamulang Jl. Rajawali Raya Blok E No. 15
Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan

Cetakan Pertama : Mei 2017
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

Ukuran : 14,5 cm x 21 cm
x + 215 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun
secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit.
(all right reserved)
KATA PENGANTAR


Jakarta, 2017
Penulis
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................ iii
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

BAB II KAJIAN TJORITIS TENTANG KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM ............................................................................................................. 11
A. Kebijakan ............................................................................................................. 11
B. Pendidikan Tinggi Islam ....................................................................................... 20

BAB III BENTUK DAN PERUBAHAN KEBIJAKSANAN DARI MASA
ORDE LAMA KE MASA ORDE BARU ......................................................................... 38
A. Orde Lama (1945-1965) ....................................................................................... 38
B. Orde Baru (1966-1998) ......................................................................................... 46

BAB IV SASARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PTI ......................... 54
A. Kedudukan PTAIN dalam Undang-undang Sisdiknas................................. 54
B. Kurikulum PTAIN .................................................................................................. 55
C. Sumber Daya Manusia ......................................................................................... 80
D. Anggaran Dana Pendidikan ............................................................................... 99
E. Pengembangan Manajemen PTAIN ................................................................. 102

BAB V IMPLIKASI DAN POSISI PTAIN ................................................................. 113
A. Implikasi Kebijakan Terhadap Eksistensi PTAIN ......................................... 113
B. Peran PTAIN dalam Pengembangan SUMber Daya Manusia ...................... 115
C. Pendidikan Tinggi Agaman Islam dan Komitmen Kebangsaan .............. 122
D. PTAIN di Tengah-tengah Perguruan Tinggi Umum ........ 124
E. Formulasi PTAIN di Tengah Masyarakat Global ........ 143
F. PTAIN dan Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam ....... 155

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 205
BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Berkaitan dengan itu pula pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda dengan upaya pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi, sehingga dalam perjalanan selanjutnya pendidikan Islam harus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Bahkan keberadaan lembaga pendidikan Islam tidak lagi hanya berbentuk non-formal yang tidak terstruktur sebagaimana zaman Nabi Saw., namun lebih berbentuk pada pendidikan yang lebih terstruktur, yakni madrasah, dan lembaga-


2 Satu lembaga pendidikan Islam yang lahir kira-kira abad ke 4 yang bercorak liqih dan hadits. Madrasah Nizomiyah merupakan satu di antara madrasah yang
Modernisasi pendidikan tinggi Islam


Banyaknya lembaga pendidikan tinggi Islam, seperti IAIN, STAIN, dan PTAIS yang muncul belakangan sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh kebutuhan pragmatis akan pengadaan sumber daya manusia yang diharapkan. Di samping ada tiga dorongan umat Islam yang mengharuskan perguruan tinggi Islam didirikan. Ketiga dorongan tersebut adalah: pertama, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah; kedua, untuk pengembangan dan peningkatan dakwah Islam hingga dipahami dan dilaksanakan secara lebih baik oleh mahasiswa dan kaum muslimin umumnya; ketiga, untuk melakukan reproduksi dan kederisasi ulama dan fungsionaris

lahir pada masa itu. Secara politis, tujuan sebenarnya yang melatarbelakangi didirikannya madrasah nidzomiyah adalah ingin menyebarkan paham sunni ke dalam jauh pendidikan, sehingga penempatan guru dan kurikulumnya pun disesuaikan dengan paham yang mereka anut; serta menempatkan kelompok orang-orang sunni bisa duduk di pemerintahan setelah lulus dari madrasah nidzomiyah. Walau pun demikian, keberadaannya pun tetap punya peran sangat penting dalam membentuk satu sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan sistematis.


Modernisasi pendidikan tinggi Islam

keagamaan lainnya, baik pada birokrasi negara, maupun lembaga-lembaga sosial, dakwah, dan Institusi Islam Swasta. Dalam konteks demikian, pengetahuan Islam kelihatanannya masih sangat mendorong ruang lingkup pendidikan ummat Islam. Kondisi demikian juga lebih diperparah oleh adanya dikhnotomi antara pendidikan Islam—yang diwakili kaum santri—dan pengetahuan umum—yang diwakili lulusan Barat, sehingga visi, misi, dan tujuan didirikannya Perguruan Tinggi Islam—pun tidak lebih sekedar menciptakan para muballigh/muballighah yang handal secara retorika dalam keilmuan Islam (baca: fiqh-ushul fiqh, tafsir, hadis); bahkan ada kesan hanya "menandingi" Perguruan Tinggi Umum yang waktu juga telah berdiri, seperti UGM.

Padahal, perkembangan dunia yang semakin kompleks dan rumit akan meniscayakan satu bentuk Pendidikan Tinggi Islam yang juga bisa menjawab tantangan yang tidak hanya persoalan keislaman (ukhrowi) akan tetapi persoalan-persoalan dunia yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, Pendidikan Tinggi Islam harus memiliki visi, misi, dan tujuan komprehensif yang tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu tertentu, tetapi juga mampu melahirkan generasi-generasi handal, sportive, jujur, memiliki integritas dan moral yang tinggi serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara profesional. Untuk menanggulangi berbagai tantangan dimaksud, paling tidak ada tiga factor pendukung yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, persoalan leadership atau kepemimpinan civitas akademika kampus. Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) harus memiliki komitmen keilmuan yang handal, integritas moral tinggi serta memiliki jaringan yang cukup kuat. Hal ini dimaksudkan agar persoalan kebijakan yang akan dikeluarkan tidak akan melenceng dari kewajiban dan kepentingan

4Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta: LOGOS, 1998), cet. 1, h. 170
pendidikan secara umum, mahasiswa, dan kemajuan bersangkutan. Untuk mendukung semuanya, sangat kalau pimpinan kampus tidak memiliki jaringan internasional. Kedua, punya visi, misi dan tujuan yang dalam pengembangan perguruan tinggi, dan ketiga, dukungan budaya, dan tradisi yang baik dari dalam maupun luar kampus.


Untuk mengkaji lebih jauh tentang arti kebijak terlebih dahulu perlu diketahui bahwa kebijakan atau dalam bahasa Inggris berarti aturan main. Dengan demikian kebijakan bisa diartikan sebagai bentuk aturan diterapkan pemerintah dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk dalam pendidikan. Misalnya, kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun

*AR. Tibawi, Islamic Education, dalam: Aszymardi Azra, Esei-esai Inti Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta: LOGOS, 1999), h. 19

*Jhon Echol dan Hasan Sadzily, Kunci Bahasa Indonesia-Inggris, h. 79
dengan membentuk Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)* guna mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang qualified dalam bidang ilmu pengetahuan Islam; dan juga pada tahun yang sama membentuk Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) untuk memenuhi hakim-hakim dalam bidang syari'ah, baik di Mahkamah Syari'ah maupun di Pengadilan Negeri, sehingga menjadi merupakan langkah positif dalam memajukan pendidikan Nasional. Namun karena kurikulum yang dipersiapkan dari kedua lembaga tersebut lebih banyak didominasi materi-materi fiqh, sehingga pada akhirnya menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung pengertian pendidikan Islam hanya terbatas pada perkara-perkara fiqh, tauhid, faraid dan hadis.\(^9\)

Adanya kebijakan saat itu, di satu sisi secara politis telah menguntungkan ummat Islam, namun pada sisi yang lain kebijakan itu pun sedikit banyak telah merugikan pendidikan Islam, karena materi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal kondisi zaman menghendaki umat manusia -khususnya umat Islam— bisa menguasai ilmu pengetahuan secara komprehensif, baik ilmu yang berbasis keduniawian (profan) sebagai bekal hidup di dunia maupun ilmu pengetahuan agama yang berorientasi pada penanaman akhlak, sehingga keduanya akan saling menunjang dan punya peran yang sama dalam merealisasikan kehidupan yang aman, adil, dan bermartabat, sebagaimana tujuan pendidikan secara umum. Pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai satu rancangan ilmu pengetahuan yang bisa diklasifikasikan menjadi ilmu keduniawian yang bersifat profan dan ilmu keagamaan, namun pada tataran praksis, pendidikan harus dipahami sebagai suatu realitas yang mampu merubah keadaan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

---

*Hanun Astohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 2001), h. 204.

*lihat Hasan Langgulung, Perilikan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 109
Kenyataannya sekarang, pendidikan justru se\cnderung ke arah sebaliknya, pendidikan tidak lagi menjadi agen perubahan (agenc of change), bahkan keberadaannya semakin tercerabut dari fungsi semula, hanya menjadi penindasan bagi golongan atas yang sedang berkusa mempunyai kemampuan. Kondisi demikian, terjadi bila hanya pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah akan tetapi sudah menjalar ke pendidikan tinggi, yang harus secara keseluruhan mengikuti keseragaman dan aturan pemerintah pusat, terutama pada masa pemerintahan O Baru (1966-1998). Sehingga keberadaan pendidikan tidak lagi bisa difungsikan sebagai lembaga yang seharusnya mempersiapkan insan akademis berwawasan luas atau agen perubahan sebagaimana diharapkan, tetapi hanya menciptakan para lulusan yang "kebingungan" ketika su menyelesaikan masa akhir studinya. Hal ini karena siswa yang diterapkan pemerintah waktu itu tidak bisa merancang satu kurikulum atau mata kuliah yang bisa membeli mahasiswa secara aplikatif dalam dunia pekerjaan.

Kondisi demikian, terus diperburuk oleh adanya dualisme dalam pengelolaan pendidikan, yakni adanya depayung departemen yang sama-sama diberi otoritas ol pemerintah untuk menjalankan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang diberikan otoriti menangani pendidikan umum, dan Depertemen Agama (Depag) dengan pendidikan yang bercirikan Islam sebagai pantauannya. Artinya secara kelembagaan sudah ada diskriminasi antara ruang ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan. Inilah mungkin satu dari sekian banyak fakto

10Departemen Agama adalah lembaga pemerintah yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, sebagai maksud untuk menala kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam Surat Keputusan pembentukan Depag dicantumkan tugas pokoknya, yaitu: (1) memberikan pelayanan keagamaan, (2) mengembangkan pendidikan agama, dan (3) membina kerukunan antar umat beragama. Lihat buku IAIN Modernisasi di Indonesia, (Jakarta: LOGOS, 2002), cet. 1, h. 61
awal perkembangan madrasah dan al-jami'ah (Perguruan tinggi) sudah berada dalam posisi yang marjinal.\textsuperscript{13}

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia bidang pendidikan, disebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah "mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau ke senian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya ke budayaan nasional".\textsuperscript{14} Dalam konteks ini, pelaksanaan perguruan tinggi sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan para generasi yang mampu menguasai IPTEK serta tidak kering akhlak sebagaimana diharapkan. Oleh karenanya, perguruan tinggi seharusnya bisa menyajikan betuk-bentuk materi kurikulum yang bisa menjembatani tercapainya tujuan tersebut. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan respon dari berbagai kegelisahan yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengajaranannya, perguruan tinggi harus menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, yakni "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".\textsuperscript{15}

Sehingga abad 21 yang dikatakan sebagai abad ilmu pengetahuan, yang berarti semakin luas penyebaran dan

\textsuperscript{13}Az yumardi Azra, \textit{Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru}, (Jakarta: Logos, 1999), h. ix

\textsuperscript{14}Departemen Pendidikan Nasional, \textit{Himpunan Perundang-Undangan Pemerintah Republik Indonesia Bidang Pendidikan}, (Sekretariat Jendral Depdiknas: 1997), h. 133

\textsuperscript{15}Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Suwiho (Kompilator), \textit{Kumpulan Peraturan-peraturan tentang Perguruan tinggi}, (Jakarta: UIIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 4
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997


Amir Faisal, Yusuf, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: GLP, 1995


Asrohah, Hanun, Dra., Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 2001


--------------, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas, 2002, cet. ke-1


--------------, Esei-esai Intelektual Muslin & Pendidikan Islam, Jakarta: LOGOS, 1999
Modernisasi pendidikan tinggi Islam

Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta, 1999

Beeby, C.F., Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan, LP3ES, Jakarta, 1998, Edisi III

Beeby, E., Pendidikan di Indonesia: Pembelajaran dan Pedoman Penetapan, Jakarta: LP3ES, tt

Beeby, C.F., Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan, LP3ES, Jakarta, 1998, edisi III

Bisri MS, Cik Hasan, Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, Jakarta: Logos, 1999


Buku Merah Putih terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, G 30 S Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aski dan Penumpasan, Jakarta: Setneg, 1994


Darmaningtyias, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Departemen Pendidikan Nasional, Himpunan Perundang-Undangan Pemerintah Republik Indonesia Bidang Pendidikan, Sekretariat Jenderal Depdiknas: 1997


Daradjat, Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

D. Marimba, Ahmad, Pengantar Filsafa Pendidikan Islam, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1962
Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam


Echol, Jhon, dan Hasan Sadzily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*,


Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fadjar Dunia, 1999


Green, Marshal, *Dari Soekarno ke Soeharto*, Jakarta: Grafiti Press, 1993


Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, cet. ke-1


Modernisasi pendidikan tinggi Islam


Mastuhu, Dr., Prof., *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: UIl Press, 2003, cet. 1


Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 1985

Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1990

PP No. 11 tahun 1960 tentang Pebentukan Institut Agama Islam Negeri

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (1976), h. 250

Partosentono, A.R., *Buku Pedoman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*